

## **Analisis Struktur Nafkah Anggota Pengelola Hutan Adat Titian Teras di Desa Demang Kabupaten Sarolangun**

### ***Analysis Of Livelihood Structure Of Titian Teras Traditional Forest Management Members In Demang Village, Sarolangun District***

**\*Marwoto, Maria Ulfa, dan Islahunnufus Tamara**

Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi

\*e-mail korespondensi : [marwoto@unja.ac.id](mailto:marwoto@unja.ac.id)

**Abstract.** *The social forestry program was first mandated in Forestry Law Number 41 of 1999 which states that the main objective of community forest management is for equitable and sustainable community welfare. The social forestry program in Demang Village, using the customary forest scheme, has become one of the means or livelihood strategies for the community and has garnered high levels of participation in social forestry. This will affect the livelihood structure based on the livelihood sources of Titian Terrace customary forest management members. The aim of this research is to analyze the livelihood structure of village community of the Titian Teras traditional forest management and analyze the contribution of the Titian Teras traditional forest to the manager's income. The data analysis used in this research is quantitative analysis and descriptive analysis by calculating revenue, cost, income and contribution on the income of customary forest-managing communities. The results of the research show that the livelihood structure of Titian Terrace customary forest management members in Demang Village is related to total on-farm income of IDR. 397,770,950/year, off farm income Rp. 131,948,700/year, and non-farm income Rp. 1,636,674,000/year. With the total income of the household income structure being Rp. 2,166,393,650/year with an average of Rp. 180,601,129/Year. Meanwhile, the total income in customary forest areas is Rp. 8,310,400/year with an average of Rp. 692,533/Year. Meanwhile, the contribution of customary forests to the total household income of members of customary forest management is 0.3821%.*

**Keywords:** *Customary Forest, Livelihood Structure, Management*

**Abstrak.** Program perhutanan sosial pertama kali diamanatkan dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan hutan adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan (*Sustainable*). Program perhutanan sosial di Desa Demang dengan skema hutan adat menjadi salah satu akses atau modal strategi nafkah oleh masyarakat dan memiliki partisipasi yang tinggi terhadap perhutanan sosial. Hal tersebut akan mempengaruhi struktur nafkah berdasarkan sumber-sumber nafkah anggota pengelola hutan adat titian teras. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur nafkah masyarakat pengelola hutan adat Titian Teras dan menganalisis kontribusi hutan adat Titian Teras terhadap pendapatan pengelola. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dan analisis deskriptif dengan menghitung penerimaan, biaya, pendapatan dan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat pengelola hutan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur nafkah anggota pengelola hutan adat titian teras di Desa Demang terhadap total pendapatan on-farm income Rp. 397.770.950/tahun, off farm income Rp. 131.948.700/tahun, dan non-farm income Rp. 1.636.674.000/tahun. Dengan total pendapatan keseluruhan struktur nafkah rumah tangga per keluarga yaitu Rp. 2.166.393.650/tahun dengan rata-rata Rp. 180.601.129/Tahun. Sementara untuk total pendapatan dalam kawasan hutan adat yaitu Rp. 8.310.400/Tahun dengan rata-rata Rp. 692.533/Tahun. Sedangkan kontribusi hutan adat terhadap total pendapatan rumahtangga anggota pengelola hutan adat 0,3821%.

**Kata Kunci:** Hutan Adat, Struktur Nafkah, Pengelola

## **PENDAHULUAN**

Program perhutanan sosial pertama kali diamanatkan dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan hutan adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (manfaat optimal) yang berkeadilan dan berkelanjutan (*Sustainable*). Ada lima skema yang digunakan untuk melaksanakan Program Perhutanan Sosial: Kemitraan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Adanya program perhutanan sosial di Desa Demang dengan skema hutan adat menjadi salah satu strategi nafkah yang dimiliki oleh masyarakat. Sumber daya alam yang ada di hutan adat titian teras dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hal tersebut merupakan salah satu akses atau modal untuk melakukan penerapan strategi nafkah. Strategi nafkah yang dilakukan rumahtangga petani meliputi kegiatan mata pencaharian mereka, pendekatan rumah tangga petani untuk mempertahankan standar hidup mereka dapat berbeda secara signifikan dari rumah tangga lainnya.

Berkaitan dengan strategi nafkah, Dharmawan (2001) memperkenalkan gagasan struktur nafkah dalam kaitannya dengan strategi nafkah. Strategi nafkah dan struktur nafkah adalah konsep yang terkait erat. Struktur nafkah

diperoleh setelah masyarakat menerapkan berbagai macam strategi nafkah untuk mencapai standar hidup yang diinginkan. Dharmawan (2001) melakukan penelitian yang melihat struktur nafkah suatu rumah tangga berdasarkan rasio atau komposisi tingkat pendapatan yang diperoleh setiap anggota rumah tangga ketika strategi nafkah diterapkan dalam waktu satu tahun untuk mencapai standar hidup yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Satria (2023) tingkat partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan pengelolaan perhutanan sosial di wilayah KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun yaitu Desa Tambak Ratu, Desa Demang dan Tambak Ratu menunjukkan rata-rata tingkat partisipasi sebesar 3.51 artinya masyarakat di wilayah tersebut memiliki partisipasi yang tinggi terhadap Perhutanan Sosial dengan tingkat nilai 1,00-5,00. Liani et al. (2015) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan petani. Zeilika. *et.al.* (2021) semakin meningkatkan variabel partisipasi petani dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan akan berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial petani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur nafkah anggota pengelola hutan adat Titian Teras dan kontribusi hutan adat Titian Teras terhadap pendapatan anggota pengelola. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi baru mengenai struktur nafkah anggota pengelola hutan adat Titian Teras di Desa Demang dan evaluasi program perhutanan sosial di Desa Demang tentang pengaruh pendapatan terhadap masyarakat.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Adat Titian Teras di Desa Demang Kabupaten Sarolangun. Pengambilan sampel penelitian ini ditentukan menggunakan metode *Sensus*. Total responden yang dijumpai di lokasi penelitian berjumlah 26 (dua puluh enam) yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) anggota pengelola hutan adat dan 2 (dua) stakeholder dari KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi metode survey dan dokumentasi. Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu berupa wawancara/kuesioner dan observasi langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari literatur ilmiah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu Analisis kuantitatif deskriptif yaitu metode analisis yang bertujuan untuk analisis yang digunakan untuk melihat total pendapatan dan kontribusi dari pemanfaatan Hutan Adat Titian Teras terhadap masyarakat Desa Demang dan menggambarkan fakta-fakta yang ditemui dilapangan untuk memperkuat hasil yang diperoleh dari data kuantitatif. Analisis data kuantitatif yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Total Penerimaan rumus : (Patia & Nizar, 2018)

$$TR = P \times Q$$

Dimana:

**TR** = *Total Revenue* atau Penerimaan Total Rp/Tahun)

**P** = *Price* atau Harga jual produk (Rp)

**Q** = *Quantity* atau Jumlah produksi (Kg/Tahun)

2. Biaya Total rumus: (Yusdi *et al.*, 2019)

$$TC = TFC + TVC$$

Dimana:

**TC** = *Total Cost* atau Biaya Total (Rp/Tahun)

**TFC** = *Total Fixed* atau Biaya Tetap (Rp/Tahun)

**TVC** = *Total Variabel Cost* Atau Biaya Tidak Tetap (Rp/Tahun)

3. Pendapatan Biasa (di luar dari pendapatan yang berasal dari hutan adat) rumus: (Suratiah, 2006):

$$I = TR - TC$$

Dimana:

**I** = *Income* atau Pendapatan (Rp/Tahun)

**TR** = *Total Revenue* atau Total Penerimaan (Rp/Tahun)

**TC** = *Total Cost* atau Total Biaya (Rp/Tahun)

4. Mengacu pada rumus perhitungan pendapatan biasa yang digunakan oleh Suratiah (2006) dengan notasi **I = *Income* atau *pendapatan*** dan rumus untuk perhitungan pendapatan dari hutan adat yang digunakan oleh Diniyati (2015) dengan notasi **P = *Pendapatan*** maka,

$$I = P$$

Pendapatan dari Hutan Adat menurut Diniyati (2015) yaitu

$$P_{hr} = P_{bk} + P_{tp}$$

Keterangan :

$P_{hr}$  = Pendapatan dari Hutan Adat

$P_{bk}$  = Pendapatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)

$P_{tp}$  = Pendapatan dari hutan adat lainnya

5. Mengacu pada rumus perhitungan pendapatan biasa yang digunakan oleh Suratijah (2006) dengan notasi  $I = \text{Income atau pendapatan}$  dan rumus untuk perhitungan pendapatan rumah tangga total yang digunakan oleh Diniyati (2015) dengan notasi  $P = \text{Pendapatan}$  maka,

$$I = P$$

Pendapatan Rumah Tangga Total menurut Diniyati (2015) yaitu

$$P_{rt} = P_{hr} + P_{uts} + P_t + P_{ki} + P_{js}$$

Keterangan :

$P_{rt}$  = Pendapatan total rumah tangga (Rp/tahun)

$P_{hr}$  = Pendapatan Hutan Adat (Rp/tahun)

$P_{uts}$  = Pendapatan dari Usaha Tani (Rp/tahun)

$P_t$  = Pendapatan dari Ternak (Rp/tahun)

$P_{ki}$  = Pendapatan dari Kolam Ikan (Rp/tahun)

$P_{js}$  = Pendapatan dari lainnya (Rp/tahun)

6. Besar kontribusi pendapatan Hutan Adat terhadap pendapatan total rumah tangga diperoleh dengan persamaan menurut Diniyati (2015) :

$$KR = \frac{P_{hr}}{P_{rt}} \times 100\%$$

Keterangan :

$KR$  = Kontribusi Pendapatan dari Hutan Adat (%)

$P_{hr}$  = Pendapatan dari Hutan Adat (Rp/Tahun)

$P_{rt}$  = Pendapatan Total Rumah Tangga (Rp/Tahun)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Nafkah

Struktur nafkah rumah tangga petani terdiri dari berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh semua anggota rumah tangga. Pengertian strategi nafkah terutama difokuskan pada *livelihood strategy* dalam sosiologi nafkah (Dharmawan, 2007)

Scoones (1998) dapat mengelompokkan strategi nafkah petani menjadi tiga (3) kelompok besar, yaitu :

1. Rekeyasa sumber nafkah pertanian adalah upaya untuk membuat sektor pertanian lebih efisien, baik dengan meningkatkan lahan subur pertanian (ekstensifikasi) atau tenaga kerja atau input teknologi dari sumber luar (intensifikasi).
2. Pola nafkah ganda yaitu suatu upaya mencari peluang atau pekerjaan lain selain dari sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan (diversifikasi pekerjaan).
3. Rekeyasa spasial merupakan usaha yang dilakukan melalui mobalisasi atau perpindahan penduduk secara permanen atau tetap maupun sirkuler (migrasi).

Ellis (2000) mengemukakan tiga kelompok untuk struktur nafkah (*income source*) :

1. Sektor *on-farm income* adalah sektor yang mengarah pada pertanian dalam arti luas (pertanian, kehutanan, peternakan, dan lain-lain). Penghasilannya berasal dari tanah pertanian milik sendiri, baik yang diusahakan oleh pemilik tanah maupun diakses melalui sewa menyewa atau bagi hasil.
2. Sektor *farm off-income* adalah sektor yang memperoleh pendapatan dari usaha diluar pertanian, tetapi masih di pertanian. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber termasuk kontrak tenaga kerja, tunjangan karyawan dan bagi hasil.
3. Sektor *non-farm income* adalah pendapatan yang mengacu pada pendapatan yang tidak berkaitan atau diluar sektor pertanian. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan bulanan, gaji pensiunan, pendapatan usaha pribadi dan lain-lain.

**Tabel 1.** Rekapitulasi responden berdasarkan struktur nafkah

No.	Sumber Nafkah	Anggota pengelola hutan adat	
		Jumlah	Frekuensi (%)
1	<i>On-farm income</i>	1	4
2	<i>Farm off-income</i>	0	0
3	<i>Non-farm income</i>	4	17
4	<i>On-farm income dan non-farm income</i>	12	50
5	<i>Off farm income</i>	6	25
6	<i>On-farm income, farm off-income dan non-farm income</i>	1	4
Jumlah		24	100

Sumber : Data primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas struktur nafkah anggota pengelola yang terlihat pada tabel terhadap persentase responden terhadap struktur nafkah anggota pengelola didominasi oleh sektor *on-farm income* dan *non-farm income* sebesar 50% atau sama dengan 12 responden. Namun upaya masyarakat juga melakukan strategi penghidupan dengan mencari kebutuhan rumah tangga untuk membantu menutupi kebutuhan yang kian meningkat yaitu sebagian dari masyarakat mendapatkan manfaat dengan adanya pengelolaan hutan adat titian teras. Sumber dari hasil hutan, sumber pendapatan usaha tani lainnya dan non usaha tani sangat mempengaruhi pendapatan total rumah tangga petani (Hermawati 2017). Secara umum usaha petani untuk memperoleh pendapatan dikelompokkan menjadi dua bentuk mata pencaharian, yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan (Ardiansa 2010). Upaya untuk dapat bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidup lebih baik dilakukan dengan mengembangkan berbagai strategi mata pencaharian (Salatalohy *et al.*, 2019).

### 1. *On-farm Income*

**Tabel 2.** Pendapatan dari sektor *On-farm income*

	Responden (Orang)	Luas lahan (Ha)	Komoditi yang ditanam	Penerimaan (Rp/Tahun)	Total Biaya (Rp/Tahun)	Total Pendapatan/Tahun
Total	14	38,5	Karet dan sawit	640.237.500	243.501.550	396.735.950

Sumber : Data primer diolah (2024)

Luas lahan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pendapatan rumahtangga (Laksana, 2023). Keberhasilan pertanian dapat diukur dari besarnya pendapatan yang dihasilkan (Suminartika *et al.*, 2017). Untuk menghitung total pendapatan yang diterima oleh anggota pengelola yaitu penerimaan dikurangi dengan total biaya. Penerimaan merupakan jumlah output yang dihasilkan dikalikan dengan harga jual produksi per unit. Omset kotor merupakan total pendapatan perusahaan yang dihitung dengan mengalikan jumlah output yang dijual dengan harga produk (Mamentiwallo *et al.*, 2019). Biaya adalah uang atau nilai *equivalen* kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang memberikan manfaat saat ini atau masa depan organisasi (Salman dan Farid, 2016). Jumlah pendapatan responden di sektor *on-farm income* yaitu Rp. 396.735.950 pertahun terdiri dari total pendapatan responden dari petani karet dan sawit.

### 2. *Farm off-Income*

**Tabel 3.** Pendapatan dari Sektor *Farm off-income*

	Responden (Orang)	Pekerjaan	Penerimaan (Rp/Tahun)	Total Biaya (Rp/Tahun)	Total Pendapatan/Tahun
Total	6	Usaha keripik singkong, pemanen karet dan sawit	133.800.000	1.851.300	131.948.700

Sumber : Data primer diolah (2024)

Pada sektor ini hanya 1 responden yang melakukan usaha keripik singkong, 2 responden pemanen sawit dan responden pemanen karet. Pada tabel total pendapatan yang diperoleh dari sektor *off-farm income* yaitu sebesar Rp. 131.948.700.

### 3. Non-farm Income

**Tabel 4.** Pendapatan dari Sektor *Non-farm Income*

	Responden (Orang)	Penerimaan (Rp/Tahun)	Total Biaya (Rp/Tahun)	Total Pendapatan/Tahun
Total	23	1.649.900.000	13.226.000	1.636.674.000

Sumber : Data primer diolah (2024)

Dalam satu keluarga, tidak hanya kepala keluarga saja yang bekerja namun anggota keluarga lain, seperti istri dan anak juga turut membantu. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota pengelola terdiri dari perangkat desa, supir, TKL, tenaga pengajar dan honorer, pedagang, wiraswasta dan buruh. Pekerjaan buruh merupakan pekerjaan yang dilakukan jika bidang pertanian tidak dapat diandalkan. Ada yang melakukan pekerjaan buruh tersebut menjadi pekerjaan utama dan sampingan.

### 4. Total Pendapatan Struktur Nafkah

**Tabel 4.** Total pendapatan struktur nafkah rumah tangga

No.	Struktur Nafkah	Nominal (Rp)
1	<i>On-farm income</i>	396.735.950
2	<i>farm off-income</i>	131.948.700
3	<i>Non-farm income</i>	1.636.674.000
	Jumlah	2.165.358.650
	Rata-rata	180.446.554

Sumber : Data primer diolah (2024)

Berdasarkan Tabel dari tiga komponen struktur nafkah terhadap total keseluruhan pendapatan total yang diperoleh berdasarkan tiga kategori struktur nafkah masyarakat diperoleh total keseluruhan mencapai Rp. 2.165.358.650 pertahun.

### Pendapatan dari Kawasan Hutan Adat Titian Teras

Hutan adat tersebut masuk dalam agenda sebagai bagian dari taksonomi perhutanan sosial dan reforma agraria. Masyarakat yang tinggal di dekat atau di dalam kawasan hutan terlibat dalam pengembangan perhutanan sosial, yang bertujuan untuk memberdayakan sumber daya hutan yang ada. Pendapatan dihitung dalam rentan waktu satu tahun berdasarkan perolehan hasil panen perkomoditi. Sukirno (2006) menyatakan Pendapatan adalah ukuran pencapaian seseorang atau masyarakat sedemikian rupa sehingga penghasilan suatu masyarakat menggambarkan perkembangan ekonomi masyarakat tersebut. Menurut Suratiyah (2011) penerimaan merupakan perkalian antara jumlah produksi dan harga jual.

**Tabel 5.** Pendapatan dari kawasan hutan adat titian teras

Pendapatan (RP/Tahun)	
Total	Rata-rata
8.310.400	692.533

Sumber : Data primer diolah (2024)

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa total pendapatan dari kawasan hutan adat yaitu sebesar Rp. 8.310.400 selama 5 bulan yang jika dirata-ratakan yaitu Rp. 692.533/bulan dalam satu tahun dengan jumlah 13 masyarakat pengelola. Pengolahan produk HHBK yang berasal dari hutan adat titian teras baru memasuki waktu 5 bulan yaitu dari bulan Agustus sampai Desember 2023. Dengan jenis kerajinan tangan seperti tikar dari umbai dengan harga satuan Rp.180.000 (ukuran besar) dan Rp.75.000 (ukuran kecil) , piring dari resam dengan harga satuan Rp.15.000 dan centong sayur dari tempurung kelapa dengan gagang berupa kayu dikaitkan oleh rotan dengan harga satuan Rp.25.000.

Harga satuan (Rp)			
Piring	Centong	Tikar	
		Besar	Kecil
15000	25000	180.000	75.000

Sumber : Data primer diolah (2024)

Pengolahan produk HHBK ini masih baru sehingga tidak semua anggota mengambil bahan langsung ke hutan adat, ada beberapa yang mengambil langsung ke lokasi dan ada yang tidak atau hanya sekedar membantu pengrajin lainnya atau baru mulai mencoba. Produk HHBK tersebut juga dibuat oleh pribadi dan akan dikumpulkan pada satu kelompok atau kth yang kemudian akan dijual secara bersamaan dengan harga yang serupa dan melakukan kerjasama kepada pihak atau kth mart di KPHP Limau Unit VII Hulu sarolangun. Sistem pemasarannya hanya dilakukan di sekitar Desa Demang saja yang sering digunakan ketika ada acara pesta pernikahan, syukuran, pameran dan acara lainnya termasuk bekerja sama dan dibantu oleh pihak KPHP Limau unit VII Hulu Sarolangun.

### **Total Pendapatan dari Kawasan Hutan dan dari Luar Kawasan Hutan**

Total pendapatan anggota pengelola hutan adat titian teras dan dari luar kawasan hutan adat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.** Total pendapatan dari dalam dan luar kawasan hutan

Pendapatan	Total Pendapatan (Rp/Tahun)	Rata-rata Pendapatan (Rp/Tahun)
Pendapatan dari dalam kawasan hutan adat	8.310.400	692.533
Pendapatan dari luar kawasan hutan adat	2.165.358.650	180.446.554
<b>Total</b>	<b>2.173.669.050</b>	<b>181.139.088</b>

*Sumber : Data primer diolah (2024)*

Pada tabel pendapatan yang diperoleh dari kawasan hutan adat adalah sebesar Rp. 8.310.400/tahun dan pendapatan dari luar kawasan hutan adat adalah sebesar Rp. 2.165.358.650/tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dari luar kawasan hutan adat lebih besar dibanding dari pemanfaatan kawasan hutan adat. Pendapatan rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan kehutanan dan pendapatan non-kehutanan. Pendapatan kehutanan adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan di hutan, sedangkan pendapatan non-kehutanan adalah pendapatan di luar kehutanan (Tanjung 2014).

### **Kontribusi Hutan Adat Titian Teras Terhadap Pendapatan Anggota Pengelola**

Istilah kontribusi berarti persentase pendapatan perusahaan terhadap total pendapatannya (Paulus *et.al.*, 2015). Kontribusi Pemanfaatan kawasan hutan adat terhadap pendapatan anggota pengelola dapat diketahui dengan membagi total pendapatan anggota pengelola dari kawasan hutan adat dengan seluruh pendapatan anggota pengelola dari kawasan hutan adat dan dari luar kawasan hutan adat dan dikalikan dengan seratus persen.

$$KR = \frac{8.310.400}{2.173.669.050} \times 100\% = 0,3823\%$$

Dengan menggunakan rumus diatas, bahwa hutan adat memberikan kontribusi sebesar 0,3823% pertahun terhadap pendapatan anggota pengelola hutan adat. Berikut dapat kita lihat seberapa besar kontribusi dari kawasan hutan adat dan kontribusi dari luar kawasan hutan adat.

**Tabel 7.** Kontribusi hutan adat dan di luar hutan adat

No.	Kontribusi	Persentase(%)
1	Kawasan Hutan Adat	0,38
2	Luar Kawasan Hutan Adat	99,62

*Sumber : Data primer diolah (2024)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pemanfaatan hutan adat hanya memberikan kontribusi sebesar 0,38% terhadap pendapatan anggota pengelola dan sebesar 99,62 % merupakan kontribusi dari luar kawasan hutan adat. Pemanfaatan kawasan hutan adat ini hanya sebatas sebagai pekerjaan sampingan anggota pengelola oleh sebab itu sedikitnya kontribusi pemanfaatan dari kawasan hutan adat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengolahan HHBK menjadi suatu kerajinan tangan, pengolahan produk HHBK tersebut masih tergolong baru dilakukan yaitu pada bulan agustus 2023, terdapat pekerjaan sampingan yang lebih terjamin dan banyak dilakukan masyarakat setempat, waktu yang tidak banyak dikarenakan harus melakukan pekerjaan lain seperti petani, guru, buruh, pedagang dan supir.

Kontribusi pemanfaatan hutan adat terhadap pendapatan anggota pengelola jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi dari luar kawasan hutan adat dikarenakan pekerjaan yang dilakukan dari hutan adat ini hanya sekedar pekerjaan sampingan dengan memanfaatkan HHBK nya saja dengan peminat yang masih sangat kecil dan baru (Agustus-Desember 2023). Akan tetapi hutan hutan adat memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan kayu untuk kebutuhan rumah dengan begitu hal tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hutan adat juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar seperti berburu, penyediaan air bersih, berbagai hasil alam yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, keberlanjutan lingkungan dan identitas

masyarakat. Hutan adat juga mampu menyimpan karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

### Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Anggota Pengelola

Pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan harus dilaksanakan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat mempertahankan dan meningkatkan fungsi dan peran hutan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang (Yusuf *et.al.*, 2011). Berdasarkan penelitian Cifor, Ritchie *et al.* (2001) menegaskan bahwa ada empat prinsip utama pengelolaan hutan, yaitu sebagai berikut :

1. Terjaminnya kesejahteraan masyarakat, hambatan terbesar untuk memastikan kesejahteraan masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk bersama-sama mengelola fungsi ganda hutan dan mendistribusikan manfaat kepada individu, rumah tangga, dan kelompok secara adil. Penghijauan sumber daya ini dapat mengarah pada penggunaan dan manfaat di masa depan.
2. Kesejahteraan rakyat terjamin; secara umum diakui bahwa orang-orang yang bergantung pada sumber daya hutan untuk mata pencaharian mereka, tinggal di dekat hutan, dan berinteraksi dengan mereka untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar, memiliki kepentingan dalam kelangsungan hidup hutan.
3. Gagasan bahwa "kesehatan hutan terjamin" menunjukkan bagaimana output sistem manajemen telah menjaga bentang alam secara keseluruhan dalam kondisi yang baik. Prinsip yang sangat mendasar ini biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan sudut pandang atau pemikiran yang beragam dari orang yang berbeda mengenai sumber daya yang mereka miliki.
4. Pengelolaan hutan rakyat setempat didukung oleh lingkungan sekitar, sehingga masyarakat didukung oleh pihak eksternal seperti pemerintah dalam upaya pengelolaan hutan lestari.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan anggota pengelola dapat diketahui dengan membagi pendapatan anggota pengelola dari sektor kehutanan yaitu petani karet dengan seluruh pendapatan total anggota pengelola dan dikalikan dengan seratus persen.

Sektor kehutanan memberikan kontribusi dengan hasil masing-masing 0,02 % - 0,54 % pertahun terhadap pendapatan 11 (sebelas) anggota pengelola hutan adat. Dengan rata-rata kontribusi 0,26 % pertahun. Berikut dapat kita lihat seberapa besar kontribusi dari sektor kehutanan pada tabel 9.

**Tabel 8.** Kontribusi sektor kehutanan terhadap setiap pendapatan anggota pengelola

	Responden (Orang)	Pendapatan sektor kehutanan	Pendapatan total	Kontribusi sektor kehutanan (%)
Total	11	226.349.550	870.291.050	3,09
Rata-rata		18.862.463	72.524.254	0,26

Sumber : Data primer diolah (2024)

Sektor kehutanan memberikan kontribusi yang sangat membantu terhadap sebagian pendapatan anggota pengelola dengan memanfaatkan karet sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Astuti (2008) mengemukakan bahwa tanaman kehutanan memiliki hasil yang lebih besar dari pada tanaman semusim, dimana tanaman kehutanan akan mampu mengatasi kebutuhan keuangan mendadak dari sektor yang lain jika dipanen pada saatnya. Dari seluruh responden hampir setengah di antaranya yang bekerja sebagai petani karet.

### Pengeluaran Rumah Tangga

**Tabel 9.** Pengeluaran rumah tangga anggota pengelola hutan adat

Rata-rata pengeluaran	Anggota pengelola hutan adat
Makanan	41.182.750
Non-makanan	59.271.333

Sumber : Data primer diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 10 pengeluaran rumah tangga yang diperoleh dari sektor makanan yaitu beras dan lauk pauk yang mana kebutuhan dan harga kebutuhan ekonomi masyarakat yang terus Meningkat sehingga diperoleh rata-rata pengeluaran anggota pengelola yaitu Rp. 41.182.750/Tahun. Pengeluaran konsumsi (makanan) menjadi pengeluaran terbesar dari setiap golongan pendapatan (Fridayanti dan Dharmawan, 2013). Selanjutnya non-makanan yaitu berupa biaya pendidikan, listrik, baju, transportasi, kesehatan, pajak, kegiatan sosial dan lainnya yang berkaitan sebesar Rp. 59.271.333/Tahun.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Struktur nafkah masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan dalam pengelolaan hutan adat yang terletak di Desa Demang Dusun Kampung Pondok Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun terhadap total pendapatan *on-farm income* Rp. 396.735.950/tahun, *off farm income* Rp. 131.948.700/tahun, dan *non-farm income* Rp. 1.636.674.000/tahun. Dengan total pendapatan keseluruhan struktur nafkah rumah tangga yaitu Rp. 2.165.358.650/tahun dengan rata-rata Rp. 180.446.554/Tahun Kontribusi hutan adat terhadap pendapatan anggota rumah tangga pengelola 0,3823%.

Hutan Adat Titian Teras berperan sebagai salah satu akses atau modal utama bagi masyarakat dalam merancang dan melaksanakan berbagai strategi nafkah. Pengelolaan hutan secara lestari ini tidak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pengelola secara berkelanjutan.

### Saran

Hutan adat titian teras memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan oleh masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun saat ini masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengembangan potensi dan partisipasi, sehingga diperlukan pembinaan berupa pemberdayaan dan komunikasi dari pemerintah atau pendamping perhutanan sosial dalam memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan adat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, disarankan kepada masyarakat di sekitar hutan yang mempunyai tingkat partisipasi untuk lebih berpartisipasi pada kegiatan pengelolaan hutan agar memberikan dampak yang baik dalam pengelolaan, karena dengan tingkat SDM yang lebih tinggi maka hutan dapat dikelola dengan lebih baik pula. Dengan begitu produk yang dibuat akan lebih banyak lagi dengan menambah ide atau kreasi terhadap produk tersebut. Menambah kerjasama untuk pemasaran produk guna masyarakat bisa lebih mengetahui dan mengenal produk yang dihasilkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansa. 2010. Analisis skala usaha tani pola agroforestry di Desa Leko Pancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. *Skripsi*. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin.
- Astuti, YA., Dharmawan, AH., Putri, EIK & Indrawan, A. 2008. Struktur Nafkah Rumahtangga dan pengaruhnya Terhadap Kondisi Ekosistem Sub DAS Citanduy Hulu. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi & Ekologi Manusia*. Volume 2 No.01.
- Dharmawan AH. 2001. *Farm household livelihood strategies and socio-economic changes in rural Indonesia* (disertasi). Germany: The Georg-August University of Gottingen.
- Dharmawan AH. 2007. Sistem penghidupan dan mata pencaharian pedesaan: pandangan sosiologi mata pencaharian (livelihood sociology) mazhab barat dan mazhab bogor. 01 (02): 127-138.
- Diniyati, D., & Achmad, B. 2015. Kontribusi Pendapatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada usaha Hutan Rakyat Pola Agroforestri di Kabupaten Tasikmalaya. Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. Volume 9 No. 1.
- Ellis F. 2000. *Rural Livelihoods an Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press, New York.
- Fridayanti, N., & Dharmawan, AH. 2013. Analisis Struktur dan Strategi Nafkah Rumahtangga Petani Sekitar Kawasan Hutan Konservasi di Desa Cipeuteuy Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Volume 01 No. 01
- Hermawati D. 2016. Persepsi, Motivasi dan Perilaku Masyarakat Adat Terhadap Pengelolaan Kawasan Hutan (Kasus Kawasan Hutan sekitar Desa Sindanglaya Banten). *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Laksana, KTA., Ambarwati IAU & Darmawan DP. 2023. Strategi dan Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani Jeruk di Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*. Volume 12 No. 01.
- Liani M,F., Roslinda, E & Muin, S . 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*. Vol. 4.
- Mamentiwallo N, Kapantow GHM & Manginsela EP. 2019. Kontribusi Usahatani Kelapa Terhadap Pendapatan Keluarga di Desa Klabat Kecamatan Diemembe Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Agri-Sosioekonomi*. 16 (1):141
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Jakarta: KLHK.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Jakarta: KLHK.
- Putusan MK 35/2012 Tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Paulus AL, Wangke WM & Moniaga VRB. 2015. Kontribusi Usahatani Kacang Panjang Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng. *Jurnal Agri-Sosioekonomi*. 11(3):53.
- Patianingsih & Nizar WY. 2018. Peran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Terhadap Pendapatan Petani Pengelola Kawasan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) di Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

- Jurnal Silva Samalas. 1(1);76-83.
- Prasetya AR. 2013. Struktur Dan Strategi Nafkah Rumahtangga Petani Peserta Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Di Bogorejo. *Skripsi*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Ritchie, C. Mc., Dougall., Mandy., Haggith., Nicolette, B & De Olivera. 2001. Kriteria dan Indikator Kelestarian Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat. *Centre for International Forestry Research (CIFOR)*. Jakarta.
- Salatalohy A, Dassir, M & Millang, S. 2019. Strategi dan Struktur Nafkah Rumah Tangga Agroforestri di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. Volume 11 No. 2.
- Salman, Kautsar, R, Farid, M. 2016. *Akuntansi Manajemen*. Indeks, Jakarta
- Satria, D. 2023. Analisis Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Studi Kasus di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Provinsi Jambi). *Tesis*. Universitas Jambi
- Scoones, I. 1998. *Sustainable Rural Livelihood:A Framework For Analysis*. IDS Working Paper No. 72. *Institute Of Development Studies*. University Of Sussex. Brighton.
- Sukirno S. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia.
- Suminartika E, Budiman MA & Kusno K. 2017. Kontribusi Usaha Tumpang Sari Kedelai Terhadap Pendapatan Petani Kedelai di Sentra Produksi Jawa Barat. *Jurnal Agribisnis Terpadu dan Sosial Ekonomi Pertanian*. 2 (2):291-357.
- Suratiyah K. 2011. *Ilmu Usaha Tani*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Suratiyah K, 2006. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Tanjung FM. 2014. Kontribusi Hutan Rakyat terhadap Pendapatan Usaha Tani di Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat . *Skripsi*. Bogor (ID) : Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB.
- UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VII Hulu Sarolangun. 2016. *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun*. Jambi
- Yusuf, M. A. dan Makarawo, T. M. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Buku. Rineka Cipta. Jakarta. 19 hlm.
- Yusdi M, Yusriadi & Sriwahyuningsih AE. 2019. Analisis pendapatan Usahatani Antara Petani yang Menggunakan Benih Padi Berlabel dan Benih Padi Non Berlabel di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ecosystem*. 19(1):61-67
- Zeilika, E., Kaskoyo, H & Wulandari, C . 2021. *The Effect Of Participation In Community Forest Management On The Welfare Of Farmers (Case Study At Mandiri Lestari Forest Farmers Community, In KPH VIII Batu Tegi*. *Jurnal Hutan Tropis*. Vol. 9